

PROLOG:

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.

PANCASILA

DALAM PUSARAN

GLOBALISASI

EDITOR:

Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D.

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M.



**PANCASILA DALAM
PUSARAN GLOBALISASI**



Prolog

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.

PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Editor:

Al-Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M



LKIS
Pelangi Aksara

PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Dominikus Rato, Dina Tsalist Wildana, Muhammad Bahrul Ulum, dkk.
@CHRM2 UNEJ, *LKIS*, 2017

xviii + 440 halaman: 15,5 x 23 cm
1. Pancasila 2. Globalisasi

ISBN: 978-602-6610-23-2

Prolog: Prof. Moh. Mahfud MD
Editor: Al Khanif, Mirza Satria Buana, Manunggal Kusuma Wardaya
Penyelaras Bahasa: Muhammad Bahrul Ulum
Perwajahan Sampul/Buku: Dwi Agusatya Wicaksana
Setting/*Layout*: Tim Redaksi

Penerbit & Distribusi:

LKIS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
<http://www.lkis.co.id>
e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration
(CHRM2) Universitas Jember

Cetakan I: 2017

Percetakan:

LKIS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 417762
e-mail: lkis.printing@yahoo.com

PANCASILA DALAM PUSARAN ISLAM TRANSNASIONAL

Al Khanif

Pendahuluan

Tulisan mengenai Pancasila dalam pusaran ideologi transnasional (Islam) ini ditujukan untuk mereposisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam tatanan dunia yang semakin kompleks. Penulis merasa perlu mengangkat tema ini mengingat kompleksitas globalisasi dengan semua atributnya pasti berpengaruh terhadap Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan juga sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kedua predikat tersebut tentu menyimpan permasalahan kebangsaan yang kompleks karena Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara-negara demokratis di Eropa Barat dan di Amerika Utara dengan realitas sosial yang “cenderung” homogen. Indonesia adalah negara kesatuan dengan beragam identitas sosial yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan beberapa identitas sosial tersebut juga mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda dan cenderung dinamis dari masa ke masa. Oleh karena itu, tulisan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa di tengah arus globalisasi ideologi ini penulis rasa semakin penting agar memberikan pemahaman yang komprehensif di masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Pancasila untuk tetap menyatukan Indonesia jelas akan semakin besar dan kompleks terutama semangat demokrasi yang mulai terbuka pasca Reformasi telah memberikan ruang yang luas dan bahkan “hampir tanpa batas” bagi munculnya ideologi-ideologi yang cenderung berseberangan dengan Pancasila. Mereka menebar dan menyebarkan semangat anti keragaman dengan mengedepankan

homogenitas yang tentu saja sangat membahayakan nilai-nilai pluralisme dan keragaman yang sudah dijadikan pilar penting berdirinya Indonesia.¹ Ideologi yang beraliran radikal secara politik sampai paham yang berhaluan moderat terus bermunculan di tengah masa transisi demokrasi yang masih rentan di Indonesia. Eksistensi mereka di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata karena semakin berkembang dan belum menunjukkan kemunduran.

Berdasarkan realitas tersebut, tulisan ini akan menyajikan analisis terkait hubungan antara realitas ideologi di dunia global dengan Pancasila. Bagian pertama akan mengulas pertarungan Komunisme versus Kapitalisme dan Demokrasi Liberal di era Perang Dingin dan bagaimana negara-negara berkembang seperti negara-negara Islam dan Muslim mayoritas serta Indonesia mengambil peran dalam konteks perang dingin tersebut. Setelah itu penulis menyajikan realitas ideologi Islam transnasional serta bagaimana penyebaran ideologi tersebut berdampak pada Pancasila dan Indonesia. Analisis-analisis tersebut kemudian penulis simpulkan untuk memberikan rekomendasi dalam sub bagian akhir dari tulisan ini.

Sosialisme dan Islam dalam Arus Global

Pasca perang dingin yang mengakhiri persaingan dua ideologi besar, Komunisme Uni Soviet versus Kapitalisme dan Demokrasi Liberal versi Barat (selanjutnya disebut dengan Kapitalisme), legitimasi Kapitalisme sebagai pemenang persaingan di dunia global nyaris tak terbantahkan lagi.² Hingga di akhir era 90an tidak ada lagi ideologi besar yang mampu menandingi dominasi Kapitalisme. Fenomena meluasnya pengaruh Kapitalisme secara global ini seakan membenarkan proposisi Francis Fukuyama yang mengatakan hegemoni Kapitalisme dengan segala atributnya selain mengakhiri perang dingin juga akan mendominasi dunia global dimana banyak negara akan mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan

¹ Lihat misalnya analisis Al Makhzoomi terkait munculnya ideologi radikal di Indonesia di Khairuldeen Al Makhzoomi, "Terrorism in Southeast Asia and the Role of Ideology", *Huffington Post* (10 March 2016), online: <http://www.huffingtonpost.com/khairuldeen-al-makhzoomi/terrorism-in-south-east-as_b_9396942.html>.

² Moh Khuzafi, "Mengintip Kapitalisme Global", *korankabar.com* (6 October 2015), online: <<http://korankabar.com/mengintip-kapitalisme-global/>>.

Barat.³ Tulisan Fukuyama tersebut begitu yakin memprediksi bahwa tidak akan ada lagi ideologi yang mampu menandingi Kapitalisme.

Diawal prediksinya, Fukuyama mendapatkan banyak dukungan karena hampir selama dua dekade, Kapitalisme tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari para pesaingnya. Bahkan Kapitalisme cenderung bisa mengisolasi sisa-sisa Komunisme dan meredam berkembangnya ideologi-ideologi baru sebagai kompetitornya. Berakhirnya persaingan Komunisme dan Kapitalisme menghadirkan monopoli ideologi di dunia global dengan kapitalisme sebagai pemain tunggal. Artinya berakhirnya perang dingin tersebut tidak serta merta memunculkan polaritas ideologi dimana negara-negara yang sebelumnya menjadi penonton berhasil memainkan peran (ideologi) mereka yang lebih besar di peta global. Atau bisa juga negara-negara ketiga memang tidak mampu untuk mengambil peran yang lebih besar dalam konteks politik global pasca berakhirnya Perang Dingin.

Hegemoni Kapitalisme tersebut sebenarnya mendapatkan perlawanan dari beberapa negara khususnya negara-negara pecahan Uni Soviet, negara-negara penganut paham Sosialisme di Amerika Latin⁴ dan juga negara-negara Islam atau negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas.⁵ Polarisasi pertarungan antar ideologi pasca Perang Dingin justru meluas ke berbagai negara. Arena pertarungan tidak lagi terpusat di dua tempat melainkan menyebar ke berbagai negara. Kawasan Timur Tengah dan Afrika menjadi kawasan yang sangat rentan karena masih banyak rejim diktator

³ Eliane Glaser, "Bring back ideology: Fukuyama's 'end of history' 25 years on", *The Guardian* (21 March 2014), online: <<https://www.theguardian.com/books/2014/mar/21/bring-back-ideology-fukuyama-end-history-25-years-on>>.

⁴ Patrick Iber membedakan negara-negara Sosialis di Amerika Latin kedalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Negara Sosialis Demokrat seperti Bolivia, Ekuador, Venezuela dan Argentina sedangkan kelompok yang kedua adalah Negara Demokrat Sosialis seperti Brasil, Uruguay, dan Chili. Lihat selengkapnya ulasan mengenai dua kelompok tersebut di Patrick Iber, "The Path to Democratic Socialism: Lessons from Latin America", *Dissent Mag* (Spring 2016), online: <<https://www.dissentmagazine.org/article/path-democratic-socialism-lessons-latin-america>>.

⁵ Tulisan ini membedakan Negara Islam dan negara dengan Muslim mayoritas. Yang masuk dalam kategori negara Islam adalah negara-negara yang secara jelas menggunakan Islam sebagai sumber hukum seperti Iran, Afghanistan dan Saudi Arabia sedangkan negara-negara dengan Muslim mayoritas adalah negara-negara yang "mengakui" adanya pengaruh Islam namun tidak menggunakan Hukum Islam sebagai sumber hukum nasional atau yang saya sebut dalam tulisan ini sebagai negara sekuler religius seperti Indonesia. Tentang konsep sekuler religius, lihat Al Khanif, "Questioning a theistic, secular Pancasila to protect religions", online: <<http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/01/questioning-a-theistic-secular-pancasila-protect-religions.html>>.

dan sistem ketatanegaraan yang memungkinkan Barat dan Kapitalisme memainkan peranan mereka.

Polarisasi pertarungan ideologi tersebut memaksa negara-negara Sosialis, Islam dan Muslim mayoritas terus melakukan perlawanan. Namun perlawanan mereka terhadap hegemoni Kapitalisme tidak berjalan baik karena tidak didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik di internal negara maupun organisasi-organisasi antar negara yang menganut kesamaan ideologi tersebut. Negara-negara di Amerika Latin yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara Sosialis justru tidak mampu melakukan perlawanan terhadap Kapitalisme dan bahkan terjebak dalam krisis ekonomi dan politik.⁶ Oleh karena itu perlawanan negara-negara Sosialis, negara-negara Islam dan Muslim mayoritas tidak pernah berhasil hingga sekarang dan bahkan justru tidak mampu menghadang laju Kapitalisme di negara mereka.

Sebenarnya negara-negara Islam dan Muslim mayoritas bersama dengan negara-negara Sosialis telah berusaha untuk membentuk organisasi semacam Gerakan Non-Blok (GNB) yang diinisiasi oleh Presiden Josip Broz Tito Yugoslavia, Presiden Gamal Abdel Nasser Mesir dan juga Presiden Sukarno Indonesia di tahun 1955.⁷ GNB pernah menjadi organisasi paling penting bagi negara-negara berkembang di era Perang Dingin namun justru kehilangan momentum untuk memainkan peran yang lebih besar pasca Perang Dingin. Beberapa sebab diantaranya adalah semangat utama dari pembentukan GNB adalah untuk membebaskan negara-negara anggota dan negara ketiga dari belenggu penjajahan.⁸ Sehingga ketika era kolonialisme telah berakhir GNB tidak mampu menunjukkan peran yang signifikan di dunia global.

Setelah kegagalan NGB, negara-negara Islam dan Muslim mayoritas juga menginisiasi berdirinya Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Peran OKI yang mayoritas anggotanya berideologi Islam pernah mencuat di era 70an.

⁶ Terkait ulasan tentang krisis ekonomi dan politik di Brasil, Ekuador dan Chili di “The Jury Is In: Latin America’s 21st Century Socialism Has Failed”, (19 May 2016), online: *PanAm Post* <<https://panampost.com/rafael-ruiz-velasco/2016/05/19/21st-century-socialism-has-failed/>>.

⁷ Andre Munro, “Non-Aligned Movement (NAM) | international organization”, *Encycl Br* (Agustus 2013), online: <<https://www.britannica.com/topic/Non-Aligned-Movement>>.

⁸ Lihat ulasan terkait permasalahan GNB pasca Perang Dingin di S I Keethaponcalan, “Reshaping the Non-Aligned Movement: challenges and vision” (2016) 3:1 Bdg J Glob South 4.

Namun peran mereka dalam politik global cenderung terus menurun dan belum bisa menandingi Kapitalisme. Padahal OKI dan GNB sudah sering berkolaborasi untuk terus memaksimalkan peran mereka di dunia global. Namun sayangnya kolaborasi tersebut lebih sering dilakukan untuk mengatasi konflik internal yang melibatkan anggota-anggota kedua organisasi tersebut.⁹ Sehingga dalam perjalannya kemudian kerjasama OKI dan GNB sering mengalami kesulitan untuk mengimbangi pengaruh Kapitalisme di wilayah mereka sendiri. Globalisasi yang tidak hanya menipiskan sekat antar negara dan juga memudahkan penyebaran ideologi besar semacam Kapitalisme dari satu negara ke negara lain,¹⁰ sangat mungkin mengisolasi ideologi lain yang berskala lokal seperti Pancasila di Indonesia.

Revivalisme Islam Transnasional

Berbagai versi sejarah mencatat bahwa tidak ada lawan berarti yang bisa menandingi Kapitalisme sampai pada akhirnya di era 90an hingga sekarang Islam dengan semua atributnya muncul berhadapan dengan Kapitalisme. Padahal hingga berakhirnya Perang Dingin tidak pernah terlihat indikasi bahwa Islam akan muncul sebagai kekuatan “penyeimbang” dari dominasi Kapitalisme karena Islam dilihat oleh Barat sebagai kelompok lain dalam diskursus pertarungan ideologi global.¹¹ Kemunculan Islam tersebut bisa disebut sebagai gelombang perlawanan ketiga terhadap dunia Barat setelah kegagalan Nazi dan Komunisme meruntuhkan monopoli Dunia Barat dengan cara mereka masing-masing. Oleh karena itu banyak pengamat mulai mengasosiasikan Islam sebagai ancaman ketiga terhadap Barat pasca Nazi dan Komunisme karena Islam dianggap menyerang legitimasi Barat terutama demokrasi, liberalisasi dan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai yang digunakan Barat untuk memengaruhi persepsi dunia global.

⁹ Salah satu persoalan mendasar yang menyita energi OKI misalnya kasus Palestina dan ketegangan antar negara di Kawasan Teluk. Lihat misalnya Tama Salim, “Palestine seeks Indonesia’s support ahead of OIC meeting”, *Jkt Post* (2017), online: <<http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/17/palestine-seeks-indonesias-support-ahead-of-oic-meeting.html>>.

¹⁰ Khuzaiifi, *supra* note 2.

¹¹ Chandra Chari, ed, *Superpower rivalry and conflict: the long shadow of the Cold War on the twenty-first century*, Routledge advances in international relations and global politics 81 (London; New York: Routledge, 2010) hlm. 9.

Di awal kemunculan Islam, banyak pengamat menyebutnya sebagai fundamentalisme agama dan bahkan ekstrimisme agama yang membahayakan demokrasi dan liberalisasi nilai-nilai Barat. Namun lambat laun terminologi tersebut terderivasi mulai yang tergolong moderat seperti yang diajukan oleh John L. Esposito dimana dia menggunakan kata revivalisme Islam sampai dengan terminologi radikal yang menyebut Islam sebagai sel teroris.¹² Beragamnya anggapan tersebut disebabkan karena Barat mulai menyadari bahwa Islam politik maupun interpretasi terhadap nilai-nilai Islam yang berkembang di negara-negara Muslim sangat heterogen.¹³ Bahkan seringkali heterogenitas politik dan teologi tersebut berdampak pada instabilitas politik di negara-negara dan juga berpengaruh terhadap keamanan kawasan. Terlebih jika konflik tersebut bercampur dengan infiltrasi dari Kapitalisme di negara tersebut.

Revivalisme Islam transnasional muncul di era 90an karena hegemoni kapitalisme dan kegagalan OKI dan NGB tersebut pada akhirnya justru memunculkan monopoli ideologi - Kapitalisme. Perkembangan Kapitalisme juga diikuti dengan masuknya semua atributnya ke berbagai penjuru dunia termasuk ke negara-negara ketiga seperti Indonesia dan negara-negara Muslim mayoritas. Penyebaran Kapitalisme dengan berbagai atributnya inilah yang kemudian memunculkan perlawanan kelompok-kelompok berideologi Islam di berbagai negara, khususnya negara Islam dan negara Muslim mayoritas. Model perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam terhadap hegemoni Kapitalisme sangat beragam mulai dari perlawanan model teror seperti yang dilakukan oleh Al Qaida sampai pada model perlawanan politik seperti yang ditunjukkan oleh Hizbut Tahrir atau perpaduan keduanya seperti yang dilakukan oleh Fraksi Hizbullah di Lebanon.

Namun dapat disimpulkan bahwa model perlawanan yang menekankan teror lebih sering ditunjukkan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Al Qaeda, ISIS, dan Majelis Mujahidin. Sedangkan gerakan perlawanan

¹² Lihat diskusi tentang terminologi fundamentalisme, ekstrimisme dan radikalisme di Anzar Abdullah, "GERAKAN RADIKALISME DALAM ISLAM: PERSPEKTIF HISTORIS" (2016) 10:1 ADDIN 1 hlm. 4.

¹³ Nasser Momayezi, "Islamic Revivalism and the Quest for Political Power" (1997) 17:2 J Confl Stud, online: <<https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/11753>> hlm. 10.

terhadap Kapitalisme dengan pendekatan politik lebih sering diajukan oleh negara atau organisasi Islam yang berafiliasi dengan negara seperti yang ditunjukkan oleh gerakan revolusi Islam Iran tahun 1979 dibawah pimpinan Ali Khomaini.

Sebenarnya Era 70 sampai 80an menjadi salah satu awal kebangkitan politik Islam di berbagai negara Muslim yang mana kebangkitan politik Islam tersebut menunjukkan kekuatan-kekuatan politik dan diskursus berbasis agama Islam untuk melawan hegemoni Kapitalisme.¹⁴ Mereka berusaha melawan Kapitalisme yang dianggap merusak tatanan nilai-nilai Islam yang selama ini diterapkan oleh semua umat Muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Misalnya Revolusi Islam Iran tahun 1979 muncul karena kegelisahan Ali Khomaini dan kelompok Islam Iran untuk menentang imperialisme Amerika dalam politik dalam negeri Iran.¹⁵ Sejak saat itu hingga sekarang politik Islam Iran telah memainkan peran yang signifikan di kawasan regional untuk melawan hegemoni Kapitalisme Barat. Pengaruh Iran di kawasan dapat dilihat misalnya dari keberhasilan mereka bekerjasama dengan Fraksi Hizbullah di Lebanon dan juga hubungan eratnya dengan pemerintahan Bashar al Assad di Syria dalam Perang Syria akhir-akhir ini.¹⁶

Sedangkan model perlawanan teror yang dilakukan oleh Al Qaeda, ISIS, ataupun kelompok-kelompok Islam radikal lainnya terhadap simbol-simbol kapitalisme tidak hanya menasar negara-negara sekuler melainkan juga di negara-negara Islam. Teror tersebut muncul karena ideologi-ideologi berbasis Islam yang selama ini diterapkan oleh beberapa negara Muslim semakin terdesak oleh nilai-nilai Kapitalisme global yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik “nilai-nilai” antara Islam dan Kapitalisme di berbagai negara Islam dan Muslim mayoritas. Di kawasan Asia Selatan,

¹⁴ Robert W Hefner, ed, *Remaking Muslim politics: pluralism, contestation, democratization*, Princeton studies in Muslim politics (Princeton, N.J: Princeton University Press, 2005) hlm. 7.

¹⁵ D Parvaz, “Iran 1979: the Islamic revolution that shook the world”, online: <<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/01/iran-1979-revolution-shook-world-2014121134227652609.html>>.

¹⁶ Lihat analisis keterkaitan Iran dalam Perang Syria di Martin Chulov, Saeed Kamali Dehghan & Patrick Wintour, “Iran hails victory in Aleppo as Shia militias boost Syria’s Bashar al-Assad”, *The Guardian* (14 December 2016), online: <<https://www.theguardian.com/world/2016/dec/14/iran-aleppo-syria-shia-militias>>.

seperti Afghanistan dan Pakistan, atau di kawasan Teluk seperti Syiria, Lebanon dan Irak, Islam terlibat dalam konflik ideologi transnasional yang kompleks sehingga menyebabkan instabilitas politik dan keamanan di kawasan-kawasan tersebut. Keadaan yang sama juga terjadi di beberapa negara di Afrika Utara seperti Libya, Tunisia dan Mesir.

Asumsi dasar dari revivalisme Islam di beberapa kawasan tersebut disebabkan karena keterlibatan dunia Barat di politik internal negara-negara tersebut.¹⁷ Kapitalisme tidak hanya menguasai sektor ekonomi melainkan juga menjadi penguasa kawasan. Kebijakan pemerintah setempat terhadap politik Islam juga berdampak pada resistensi beberapa kelompok Islam. Kondisi inilah yang seringkali memunculkan ekstrimisme kelompok Islam untuk melawan pengaruh Barat di beberapa negara dan kawasan.¹⁸ Hal ini disebabkan karena Islam bagi mayoritas Muslim dianggap sebagai solusi terbaik dengan menawarkan ketertiban sosial bagi umat Islam untuk memecahkan persoalan-persoalan kontemporer. Di Indonesia misalnya, kelompok-kelompok Islam yang melakukan perlawanan terhadap simbol-simbol Kapitalisme tidak hanya terepresentasikan oleh kelompok Islam radikal semacam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI) melainkan juga diwujudkan dalam bentuk perjuangan politik di parlemen.¹⁹

Di kawasan Asia Tenggara, perlawanan ideologi Islam terhadap Kapitalisme cenderung terlokalisir di Indonesia meskipun ada sebagian kecil yang berkembang di Malaysia, Thailand dan Philipina. Kelompok Islam radikal di Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan ideologi Islam radikal yang berkembang di banyak negara seperti Kawasan Teluk dan Asia Selatan. Hubungan inilah yang menyebabkan kelompok Islam di Indonesia dapat disebut sebagai representasi ideologi Islam transnasional karena pola hubungan mereka dapat terlacak dari adanya hubungan gerakan Islam transnasional yang berkembang dari kawasan Teluk dan Afrika Utara. Bahkan jaringan dan pola gerakan Islam radikal di Indonesia juga berkaitan dengan gerakan perlawanan kelompok Islam di Filipina, Malaysia dan Thailand.

¹⁷ Abdullah, *supra* note 11 hlm. 8.

¹⁸ Chandra Chari, *supra* note 10 hlm. 58–9.

¹⁹ Nadirsyah Hosen, "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate" (2005) 36:03 J Southeast Asian Stud 419 hlm. 426.

Hubungan antara ideologi Islam radikal Indonesia dengan Islam radikal di Timur Tengah dapat dilihat dari Perang Padri di era kolonialisme yang mana kelompok Imam Bonjol dan kelompoknya menggunakan Wahabisme untuk melawan imperialisme Belanda yang anti Islam.²⁰ sedangkan keterkaitan antara Islam radikal di Indonesia dengan di Asia Selatan dapat dilihat dari sejarah keterlibatan Majelis Mujahidin Afghanistan dalam perang melawan Uni Soviet yang menyebabkan beberapa umat Islam di Indonesia melakukan jihad ke Afghanistan.²¹ Ketika perang sudah selesai, mereka kembali ke Indonesia dengan membawa paham radikal dan melihat konsep Pancasila sama halnya dengan Komunisme dan Kapitalisme yang harus mereka lawan.

Di Indonesia, usaha untuk mereposisi Islam dalam konteks kenegaraan telah beberapa kali dilakukan baik secara politik maupun perlawanan perang. Di era Orde Lama, perlawanan kelompok Islam dilakukan oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Alasan utama dari gerakan perlawanan ini adalah karena mereka tidak puas dengan konsep Ideologi Pancasila yang menurut mereka tidak merepresentasikan kepentingan umat Islam di Indonesia.²² Model perlawanan melalui kekerasan oleh kelompok Islam memang meredup di era Orde Baru karena pola kepemimpinan Suharto yang otoriter. Bahkan Suharto dianggap berhasil meredam perlawanan mereka meskipun Suharto lah orang yang pertama kali membuka ruang masuknya Kapitalisme di Indonesia hingga saat ini.

Pancasila versus Islam Transnasional

Pascareformasi, beberapa fraksi politik di parlemen terang-terangan ingin memasukan lagi Piagam Jakarta dalam konstitusi sebagai bagian dari upaya untuk keluar dari cengkeraman Kapitalisme. Gerakan politik Islam di parlemen tersebut muncul karena adanya desakan dari MMI dan FPI kepada

²⁰ Al Khanif, *Protecting Religious Minorities within Islam in Indonesia: A Challenge for International Human Rights Law and Islamic Law* SOAS University of London, 2015) [unpublished] hlm. 129.

²¹ Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto" hlm. 34–5.

²² Lihat ulasan terkait perlawanan kelompok Islam di era Orde Lama di Al Khanif, "Diskursus Minoritas Agama dalam Konsep Sekuler-Theistik Pancasila" in *Reaktualisasi Pancasila Menyoal Identitas Glob Dan Diskurs Negara-Bangsa* (Ombak Press, 2015).

partai-partai Islam untuk memasukan lagi Piagama Jakarta yang mewajibkan umat Islam di Indonesia untuk menjalankan Syariah Islam seperti yang pertama kali digagas pada tahun 1945.²³ Meskipun pada akhirnya usaha memasukan nilai-nilai Islam melalui jalur politik gagal, namun gerakan politik Islam di Indonesia tidak pernah padam dan bahkan semakin menyebar di Indonesia. Hal ini disebabkan agama masih menjadi pilar penting di masyarakat meskipun Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Reaksi dari kelompok Islam dan partai politik berasaskan Islam seperti yang ada di Indonesia tersebut merupakan dampak dari kontestasi antara Islam dan Kapitalisme yang banyak terjadi di negara lain. Gerakan perlawanan politik Islam dengan beragam bentuknya menawarkan ide-ide baru di bidang pendidikan, hukum, politik dan ekonomi kepada masyarakat luas untuk mengimbangi hegemoni Kapitalisme yang sudah tumbuh subur di berbagai negara termasuk Indonesia. Kelompok seperti Hizbut Tahrir misalnya melakukan perlawanan terhadap Kapitalisme dengan mengatakan bahwa Kapitalisme dengan semua atributnya berusaha memisahkan agama dari kehidupan manusia.²⁴ Model perlawanan terhadap Kapitalisme seperti yang dilakukan oleh HTI ini ternyata mendapatkan simpati dari sebagian umat Muslim di Indonesia.

Konteks revivalisme Islam transnasional di Indonesia tersebut mungkin dapat dijadikan proposisi dari tesisnya Fukuyama yang memprediksikan bahwa selesainya perang dingin bukan berarti menyelesaikan konflik ideologi melainkan dunia akan mempunyai fenomena konflik baru yang lebih kompleks dan dinamis.²⁵ Sejak peristiwa 9/11 dan ekspansi militer pimpinan Amerika ke Irak dan Afghanistan, Kapitalisme tidak benar-benar mendominasi dunia global karena gerakan revivalisme Islam mendapatkan tempat di sebagian negara Islam dan Muslim mayoritas seperti di Iran. Peristiwa Arab Spring yang melanda kawasan Afrika Utara dan Kawasan Teluk yang pada dasarnya memperlihatkan nilai-nilai demokrasi versi Barat

²³ Terkait perdebatan di parlemen tentang Piagam Jakarta, lihat Hosen, *supra* note 18 hlm. 425.

²⁴ Robert W Hefner, ed, *Remaking Muslim politics: pluralism, contestation, democratization*, Princeton studies in Muslim politics (Princeton, N.J: Princeton University Press, 2005) hlm. 310.

²⁵ Francis Fukuyama, *The end of history and the last man* (New York: Toronto: New York: Free Press/ ; Maxwell Macmillan Canada/ ; Maxwell Macmillan International, 1992) hlm. 45.

justru berakhir dengan terpilihnya tokoh-tokoh politik Islam. Pasca runtuhnya Rejim Hosni Mubarak, masyarakat Mesir justru memilih Mohammad Morsi yang menganut paham Islamnya Hasan al Bana sedangkan rakyat Tunisia lebih suka memilih Partai Islam Ennahda.²⁶

Selain itu, faksi-faksi Islam radikal di beberapa kawasan juga terus melakukan perlawanan meskipun pola perlawanan mereka bersifat sporadis. Di kawasan Asia Tenggara, kelompok-kelompok Islam radikal terus berusaha mempertahankan eksistensi mereka ditengah tekanan politik dan militer di negara-negara kawasan tersebut. Mereka melakukan perlawanan terhadap simbol-simbol Kapitalisme, tidak hanya semata untuk menggantikan sistem demokrasi yang selama ini sudah dipraktikan oleh negara-negara di Asia Tenggara melainkan juga untuk mengembalikan lagi kejayaan mereka di masa lalu.

Di Indonesia, Islam mengalami masa kejayaan di awal-awal kedatangannya di Indonesia sampai akhirnya kedatangan kolonialisme Barat di Indonesia merubah posisi Islam sebagai ekspatriat. Posisi Muslim sebagai “ekspatriat” bisa dilihat dari kebijakan Belanda yang membagi hukum kedalam tiga golongan, yakni hukum sipil Belanda yang berlaku untuk orang Eropa, hukum Adat untuk orang pribumi dan hukum Islam bagi keturunan Arab yang beragama Islam.²⁷ Bahkan Belanda memasukan etnis Arab kedalam klasifikasi “oriental” bersama dengan orang China dan India dimana dua kelompok yang terakhir kemudian mengikuti sistem hukum Belanda. Posisi Muslim sebagai ekspatriat ini tentu berdampak pada upaya mereka untuk melawan dominasi imperialisme sejak era kolonialisme sampai pasca kemerdekaan. Hingga sekarang pun beberapa kelompok Islam cenderung lebih suka menjelaskan bahwa kemerosotan Islam terutama di bidang ekonomi dan politik karena disebabkan hegemoni Kapitalisme.

Gerakan politik Islam di Indonesia untuk mengganti Pancasila juga dapat bermakna ganda. Yang pertama adalah perlawanan mereka terhadap

²⁶ Joseph V Micallef, “The Arab Spring: Six Years Later”, *Huffington Post* (29 January 2017), online: <http://www.huffingtonpost.com/joseph-v-micallef/the-arab-spring-six-years_b_14461896.html>.

²⁷ Kelompok Islam termasuk dalam “oriental” bersama kelompok Asia sedangkan klasifikasi “Eropa” tidak hanya didasarkan pada persamaan etnis melainkan juga berbasis hukum dimana orang-orang dari negara yang menerapkan sistem hukum yang mirip dengan Belanda masuk dalam kategori Eropa. Lihat selengkapnya terkait klasifikasi tersebut di J Leyser, “Legal Developments in Indonesia” (1954) 3:3 *Am J Comp Law* 399 hlm. 403.

prinsip-prinsip Kapitalisme dan Demokrasi Liberal yang cenderung mengisolasi agama dari negara. Oleh karena itu, kesuksesan Barat melakukan sekularisasi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, karena dapat mengancam Islam yang tidak hanya dipandang sebagai agama melainkan juga sebagai pegangan hidup bagi penganutnya. Pendapat mereka ini lebih banyak didasarkan pada realitas bahwa banyak umat Islam yang menginginkan agar masyarakat mereka diperintah sesuai dengan al-Qur'an dan syaria Islam sebagai aturan bernegara.²⁸

Prinsip-prinsip Pancasila yang kurang “tegas” mengatur posisi agama dan negara dianggap merepresentasikan nilai-nilai Barat. Di kalangan Islam radikal dan fundamental, Pancasila dianggap telah melakukan subordinasi terhadap Islam secara ideologis karena dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia Islam berada dibawah naungan Pancasila sebagai payung suci tertinggi di Indonesia. Padahal Islam selama ini dianggap oleh mayoritas penganutnya bukan hanya dipandang sebagai alternatif ideologis melainkan juga keharusan teologis dan praktik yang harus dilakukan secara bersamaan.²⁹ Artinya, Pancasila selama ini menghadapi permasalahan mendasar terkait dengan nilai-nilai yang dianggap bersinggungan dengan prinsip dasar ideologi lain. Pancasila dianggap merepresentasikan nilai-nilai Barat karena tidak mengakui hukum berbasis Islam dan tidak mengenal sistem ketatanegaraan berbasis agama.

Pancasila dan Islam: Konvergensi ataukah Divergensi?

Telah banyak pendapat yang mengulas hubungan antara Pancasila dan Islam dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia dari para pemikir Muslim seperti Nurcholis Madjid, Syafii Maarif, dan Abdurrahman Wahid. Ketiganya merupakan penganjur konvergensi antara Pancasila dan Islam karena menurut ketiganya Pancasila dan Islam tidak harus dibenturkan karena keduanya saling melengkapi.³⁰ Bahkan mayoritas umat Islam di Indonesia juga masih percaya terhadap Pancasila sebagai ideologi dan

²⁸ Lihat Abdullah, *supra* note 11 hlm. 9.

²⁹ *Ibid* hlm. 18.

³⁰ Lihat ulasan mengenai pendapatnya Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid di Anies Rasyid Baswedan, “Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory” (2004) 44:5 Asian Surv 669 hlm. 675.

payung suci dalam bernegara. Buktinya di setiap gelaran pemilu di era Reformasi, partai-partai berbasis agama tidak pernah mendominasi perolehan suara.³¹ Bahkan usaha mereka untuk memasukan lagi semangat Piagam Jakarta pada waktu pembahasan amandemen konstitusi tahun 1999 telah gagal.

Lalu kenapa hingga saat ini masih ada pemikir dan tokoh politik Muslim yang tetap ingin mengganti Pancasila dengan ideologi berbasis Islam? salah satu sebabnya adalah karena pengaruh Islam transnasional yang semakin kuat di negara-negara Islam dan Muslim mayoritas. Seringkali pola gerakan Islam transnasional menggunakan cara-cara Demokrasi Liberal versi Barat untuk merebut kekuasaan seperti yang terjadi di Mesir pasca Mubarak maupun kemenangan Partai Islam Ennahda di Tunisia pasca Zine El Abidine bin Ali. Kondisi politik di internal negara-negara tersebut seperti rejim yang otoriter dan korup dan juga jaringan Islam transnasional yang kuat menjadi pemicu munculnya ideologi Islam.

Di Indonesia, upaya untuk memasukan nilai-nilai Islam dalam konstitusi memang telah gagal dilakukan. Namun gerakan Islam transnasional terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Mereka “cenderung” mendapatkan simpatisan dari kalangan muda dan terpelajar. Dalih mereka adalah menjadi negara Islam tidak berarti anti modernisasi. Namun jika dilihat lebih jauh modernitas “cenderung” identik dengan Barat. Padahal salah satu tujuan utama politik Islam adalah mengganti sistem kenegaraan yang ada dengan versi penafsiran Islam mereka.

Referensi

Chandra Chari, ed. *Superpower Rivalry and Conflict: the Long Shadow of the Cold War on the Twenty-First Century*, Routledge Advances in International Relations and Global Politics 81 (London; New York: Routledge, 2010).

³¹ Reslawati Reslawati, “Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Legislative 2009 di DKI Jakarta” (2016) 9:34 Harmoni 122.

- Fukuyama, Francis. *The end of history and the last man* (New York: Toronto: New York: Free Press/Maxwell Macmillan Canada/Maxwell Macmillan International, 1992).
- Hefner, Robert W, ed. *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton, N.J: Princeton University Press, 2005).
- Khanif, Al. *Protecting Religious Minorities within Islam in Indonesia: A Challenge for International Human Rights Law and Islamic Law* SOAS University of London, 2015) [unpublished].
- Abdullah, Anzar. "GERAKAN RADIKALISME DALAM ISLAM: PERSPEKTIF HISTORIS" (2016) 10:1 ADDIN 1.
- Baswedan, Anies Rasyid. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory" (2004) 44:5 Asian Surv 669.
- Bruinessen, Martin van. "Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto".
- Chulov, Martin, Saeed Kamali Dehghan & Patrick Wintour. "Iran hails victory in Aleppo as Shia militias boost Syria's Bashar al-Assad", *The Guardian* (14 December 2016), online: <<https://www.theguardian.com/world/2016/dec/14/iran-aleppo-syria-shia-militia>>.
- Glaser, Eliane. "Bring back ideology: Fukuyama's 'end of history' 25 years on", *The Guardian* (21 March 2014), online: <<https://www.theguardian.com/books/2014/mar/21/bring-back-ideology-fukuyama-end-history-25-years-on>>.
- Hosen, Nadirsyah. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate" (2005) 36:03 J Southeast Asian Stud 419.
- Iber, Patric. "The Path to Democratic Socialism: Lessons from Latin America", *Dissent Mag* (Spring 2016), online: <<https://www.dissentmagazine.org/article/path-democratic-socialism-lessons-latin-america>>.
- Keethaponcalan, S.I. "Reshaping the Non-Aligned Movement: Challenges and Vision" (2016) 3:1 Bdg J Glob South 4.
- Khanif, Al. "Diskursus Minoritas Agama dalam Konsep Sekuler-Theistik Pancasila" in *Reaktualisasi Pancasila Menyoal Identitas Glob dan Diskurs Negara-Bangsa* (Ombak Press, 2015).
- . "Questioning a theistic, secular Pancasila to protect religions", online: <<http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/01/questioning-a-theistic-secular-pancasila-protect-religions.html>>.

- Khuzaifi, Moh. “Mengintip Kapitalisme Global”, *korankabar.com* (6 October 2015), online: <<http://korankabar.com/mengintip-kapitalisme-global/>>.
- Leyser, J. “Legal Developments in Indonesia” (1954) 3:3 *Am J Comp Law* 399.
- Makhzoomi, Khairuldeen Al. “Terrorism in Southeast Asia and the Role of Ideology”, *Huffington Post* (10 March 2016), online: <http://www.huffingtonpost.com/khairuldeen-al-makhzoomi/terrorism-in-southeast-as_b_9396942.html>.
- Micallef, Joseph V. “The Arab Spring: Six Years Later”, *Huffington Post* (29 January 2017), online: <http://www.huffingtonpost.com/joseph-v-micallef/the-arab-spring-six-years_b_14461896.html>.
- Momayezi, Nasser. “Islamic Revivalism and the Quest for Political Power” (1997) 17:2 *J Confl Stud*, online: <<https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/11753>>.
- Munro, Andre. “Non-Aligned Movement (NAM) | international organization”, *Encycl Br* (Agustus 2013), online: <<https://www.britannica.com/topic/Non-Aligned-Movement>>.
- Parvaz, D. “Iran 1979: the Islamic revolution that shook the world”, online: <<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/01/iran-1979-revolution-shook-world-2014121134227652609.html>>.
- Reslawati, Reslawati. “Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Legislative 2009 di DKI Jakarta” (2016) 9:34 *Harmoni* 122.
- Salim, Tama. “Palestine seeks Indonesia’s support ahead of OIC meeting”, *Jkt Post* (2017), online: <<http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/17/palestine-seeks-indonesias-support-ahead-of-oic-meeting.html>>.
- “The Jury Is In: Latin America’s 21st Century Socialism Has Failed”, (19 May 2016), online: *PanAm Post* <<https://panampost.com/rafael-ruiz-velasco/2016/05/19/21st-century-socialism-has-failed/>>.

